

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kepemimpinan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dari realitas, karena memimpin dan dipimpin merupakan bagian dari kehidupan. Seorang kepala Negara adalah pemimpin bagi rakyatnya, seorang ketua suatu organisasi adalah pemimpin bagi anggotanya, seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya dan seorang ayah adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, bahkan setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya, kehadiran manusia di muka bumi sudah mengemban amanah kekhalifahan atau kepemimpinan untuk melayani, pengabdian dan bahkan untuk menjaga dan mengatur bumi dengan sebaik-baiknya guna tercipta kehidupan yang damai dan tentram (Najib, 2013:Vol.3)

Sementara itu, dalam deskripsi tentang kepemimpinan di Indonesia, lazimnya dalam jangka lima tahun satu kali, rakyat Indonesia selalu disibukkan dengan pemilihan pemimpin (pemilu). Mulai dari pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) hingga pemilihan anggota eksekutif, baik pemilihan presiden (Pilpres), hingga kepala daerah (Pemilukada).

Dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu Negara yang sistem kepemimpinannya mengacu pada sistem demokrasi, dalam arti Negara yang lebih mengedepankan persamaan hak dan kewajiban agar semua rakyatnya turut andil dalam memerintah dan mengurus tatanan kenegaraan dengan perantara wakilnya (pemimpin). Untuk itu, sebelum pemilihan tiba kampanye pun dijadikan senjata dan cara paling efektif untuk merekrut sebanyak-banyaknya suara atau massa. Sehingga kadang-kadang mereka memperlihatkan diri lebih nasionalis dan agamis yang lebih layak untuk menjadi wakil rakyat dari

pada kandidat-kandidat yang lain, ayat dan hadis pun terkadang dijadikan sakralisasi untuk rekrutmen pendukung (Muhtadi dalam Najib, 2013)

Di era saat ini seorang pemimpin hadir dari berbagai kalangan dan profesi. Dari mulai Kiyai yang notabennya merupakan tokoh agama bagi masyarakat yang berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai religius terhadap masyarakat. Saat ini mulai terjun dalam dunia politik dan tak jarang terlihat maju dalam setiap pemilihan kepala daerah. Bahkan saat ini dunia politik banyak diwarnai oleh wajah-wajah kalangan selebritis. Banyak sekali para selebriti tanah air berhasil keluar menjadi kepala daerah. Seperti halnya, Gubernur Jambi 2016, Wakil Walikota Palu 2016, Gubernur Banten 2014-2017, Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013, dan masih banyak lagi.

Bahkan dunia perpolitikan saat ini mulai digemari oleh kaum hawa. Tak heran jika saat ini banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi pejabat tinggi Negara. Kesetaraan gender mulai terlihat. Perempuan saat ini juga ingin berpartisipasi dalam memajukan Bangsa. Maka dari itu mulai bermunculan para calon-calon kepala daerah dari kaum perempuan.

Pada dasarnya kepemimpinan tidak membedakan siapa pelakunya, apakah dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Bagi keduanya berlaku persyaratan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang mencolok mereka sama-sama mempunyai kedudukan, derajat, hak serta kewajiban.

Menurut Susilastuti (dalam Afrihayana, 2009) menjelaskan “laki-laki berbeda dengan perempuan”. Pernyataan ini dapat dikatakan berlaku universal. Perbedaan antara keduanya hanya terbatas pada perbedaan biologis. Perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, cenderung mengalah, lebih lemah, kurang aktif dan keinginan untuk mengasuh. Sebaliknya, laki-laki sering

ditampilkan sebagai seseorang yang besar, dominan, lebih kuat, lebih efektif, otonomi serta agresif.

Namun saat ini, kepemimpinan perempuan masih menjadi pro dan kontra diwilayah publik. Kepemimpinan identik dengan kaum laki-laki sehingga apabila perempuan menjadi pemimpin dianggap sebagai hal yang tabu. Hal ini bermula dari ideologi gender yang telah terinternalisasi di masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Ideologi gender menghasilkan pelabelan peran sosial yang harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan lebih cocok bekerja diwilayah domestik. Sedangkan laki-laki bekerja diwilayah publik dan tidak semestinya mengurus pekerjaan rumah tangga. Pembakuan peran-peran gender yang berbeda pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial mengakibatkan adanya ketimpangan sosial yang merugikan posisi perempuan. Kuatnya ideologi gender yang patriarkhis menyebabkan perempuan tidak mempunyai pilihan lain selain tetap bekerja di sektor publik tetap saja perempuan mengalami diskriminasi gender.

Perempuan terus memperjuangkan adanya kesetaraan gender. Saat ini perjuangan kesetaraan gender telah menjadi agenda internasional dan nasional. banyak konvensi internasional dan undang-undang mengenai kesetaraan pria dan perempuan yang menuntut *affirmative action* atau *positive action* dalam melaksanakan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender di Indonesia dirumuskan dalam kebijakan publik yang berupa Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut: 1) Undang- Undang Republik Indonesia No.07 Tahun 1994 tentang pengesahan konvensi tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women*).2) Instruksi presiden No.09 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Instruksi presiden itu bertujuan: melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas program kebijakan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai

dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Pengarusutamaan gender dilaksanakan antara lain melalui analisis gender dan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah (Tilaar dan Riant, 2009:162). Meskipun *secarade facto*, perempuan mempunyai banyak peluang untuk menjadi pemimpin tetapi juga melingkar pada aspek budaya, ideologi gender dan tradisi Patriarkhi.

Di tahun 2018 ini Pilkada serentak akan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur yang akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurnya. KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menetapkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut adalah Khofifah Indar Parawansa berpasangan dengan Emil Dardak dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menggandeng Puti Guntur Soekarnoputri sebagai wakilnya. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Pada pilkada tahun 2018 terdapat calon gubernur perempuan yang maju. Pro dan kontra pun mulai bermunculan terhadap calon gubernur perempuan tersebut.

Kejadian tersebut bukan kali pertamanya terjadi di Indonesia khususnya di daerah Madura. Pada awal era reformasi. Kala itu Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Fenomena ini membuat adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat dengan berbagai alasan. Pertama, masyarakat menolak karena alasan doktrin agama dan nilai kebudayaan. Kedua, masyarakat yang menerima karena alasan emansipasi wanita. Di pulau Madura para ulama menolak adanya pemimpin perempuan. Para ulama beranggapan bahwa Presiden perempuan baru bisa diterima jika dalam keadaan darurat dalam pengertian ini jika sudah tidak ada lagi laki-laki (Abdul Manan:1999).

Pada pilkada Jawa Timur 2013 lalu juga terdapat aksi penolakan keras terhadap calon pemimpin perempuan yang diduduki oleh khafifah Indar Parawansa. Aksi penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat Madura di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Bangkalan memasang banner besar dengan mengharamkan untuk memilih pemimpin perempuan.

Kepemimpinan perempuan di sektor publik tampaknya akan menjadi persoalan yang memerlukan penanganan dalam upaya pencarian solusi bagi keberadaannya. Dimana cara pandang Islam mengharuskan untuk menjadikan dalil-dalil syara' sebagai sandaran atau acuan dalam menyelesaikan persoalan termasuk persoalan kepemimpinan perempuan di sektor publik. Begitupula santri yang menjadi pengurus di pondok pesantren, sebagai kaum yang mempelajari ajaran Islam mereka memahami, bahwa permasalahan seperti kepemimpinan perempuan telah dijelskan dalam Al-Qur'an yang menjadi kitab pedoman kehidupan mereka dalam memaknai suatu kondisi realitas yang terjadi di masyarakat.

Menurut peneliti, fenomena diatas sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Bagaimana persepsi pengurus pondok pesantren khususnya di Kabupaten Sumenep terhadap pencalonan Gubernur perempuan pada pilkada Jawa Timur 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Bagaimana persepsi pengurus pondok pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap pencalonan Gubernur perempuan pada pilkada Jawa Timur 2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang persepsi pengurus pondok

pesantren terhadap pencalonan Gubernur perempuan pada pilkada Jawa Timur 2018.”

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam ilmu komunikasi politik gender.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya jenis peneltian dan dapat memberikan sumbangan ilmu khususnya dalam dunia ilmu komunikasi.
3. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tentang persepsi pengurus pondok pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap pencalonan Gubernur perempuan pada pilkada Jawa Timur 2018